

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN PENGHUBUNG BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT

(Studi Formulasi Kebijakan Infrastruktur Jalan Penghubung Antara Dusun di Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu NTB)

Hamdani¹, Afifuddin², Hayat³

Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang, Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

LPPM Unisma Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

E-mail: m.fhauzan28@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan merupakan pencapaian dan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Infrastruktur masih menjadi persoalan serius di negeri ini, terutama ditingkat pedesaan. Tidak sedikit infrastruktur desa yang saat ini kondisinya tidak terurus, bahkan masih banyak desa yang belum memiliki infrastruktur semisal minimnya proses pembangunan jalan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur jalan penghubung antar dusun adalah salah satu alternatif pembangunan yang produktif untuk memicu segala aspek pertumbuhan baik sosial, ekonomi, serta meningkatkan sumber daya manusia pada umumnya. Berdasarkan tujuan pembangunan infrastruktur jalan penghubung tersebut, maka pelaksanaannya harus mengarah pada hal-hal yang substantif sesuai apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Tentunya pada bidang pendidikan, kesehatan, dan lebih khususnya ekonomi. Maka formulasi kebijakan adalah jawaban untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai menuju desa yang mandiri. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik penentuan informan dilakukan dengan purposive sampling, dan untuk teknik analisis data menggunakan reduksi data, pengajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Kwangko dalam formulasi kebijakan yang melibatkan masyarakat yaitu: Dalam proses formulasi kebijakan masyarakat terlibat aktif dalam tahap proses perencanaan pengambilan keputusan. Bentuk partisipasi masyarakat Desa Kwangko tergolong macam-macam seperti ikut mendukung, menyelenggarakan dan ikut serta dalam program, dalam berpartisipasi ada warga yang aktif dan ada juga yang tidak aktif. Usaha aparat desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam formulasi kebijakan yaitu: memberikan arahan, memberikan motivasi, dan memberikan insentif langsung maupun tidak langsung secara keseluruhannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi formulasi kebijakan infrastruktur jalan penghubung antara dusun Desa Kwangko. Bahwa faktor yang menjadi pendukung yakni: faktor kedarifan masyarakat dan koordinasi semua stakeholder. Faktor yang menjadi penghambat yakni: masalah anggaran dan rendahnya kualitas Pendidikan secara keseluruhannya.

Kata Kunci : Pembangunan, Formulasi Kebijakan, dan Partisipasi.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan pencapaian dan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Infrastruktur masih menjadi persoalan serius di negeri ini, terutama ditingkat pedesaan. Tidak sedikit infrastruktur desa yang saat ini

kondisinya tidak terurus, bahkan masih banyak desa yang belum memiliki infrastruktur semisal minimnya proses pembangunan jalan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur jalan penghubung antar dusun adalah salah satu alternatif pembangunan yang produktif untuk memicu segala aspek pertumbuhan baik sosial, ekonomi, serta meningkatkan sumber daya

manusia pada umumnya. Berdasarkan tujuan pembangunan infrastruktur jalan penghubung tersebut, maka pelaksanaannya harus mengarah pada hal-hal yang substantif sesuai apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Tentunya pada bidang pendidikan, kesehatan, dan lebih khususnya ekonomi.

Pembangunan infrastruktur jalan penghubung harus diletakkan pada pertumbuhan ekonomi, kita menyadari arti pentingnya dari sarana jalan tersebut sebagai alur transportasi sebagai aktivitas seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. pembangunan jalan penghubung bukan hanya menghubungkan antar dusun. Akan tetapi segala aspek kebutuhan dan menjalani roda kehidupan. Maka layak disebut sebagai hal yang sangat mendasar dan mutlak harus dilakukan sebagai akses kegiatan masyarakat lainnya. Dalam hal ini pemerintah mengembangkan Desa dengan perencanaan pembangunan berupa pembuatan infrastruktur khususnya pembuatan jalan penghubung antar sebagai salah satu akses menuju antar dusun terutama dengan desa, kota-kota lainnya. Maka desa wajib mengelola desanya sesuai amanat UU.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 dan Peraturan Pemerintahan RI Tahun 2015 Tentang Desa

menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai langkah untuk mewujudkan pemerintah desa yang otonomi dan mandiri, maka dikeluarkan Undang-Undang (UU) No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa dalam pemerintahan desa terdapat Peraturan Desa dan Pembangunan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Desa.

Desa Kwangko, desa yang paling kaya potensi kekayaan hasil alam daratan dan lautan. Terutama antar dua dusun yaitu Dusun Pulau Bajo, merupakan dusun yang bertempat tinggal didalam kepulauan, banyak potensi yang dihasilkan oleh dusun tersebut diantaranya ikan laut, kepiting, dan rumput laut. Begitu juga dengan dusun kwangko kaya akan hasil pertanian, peternakan. Selama bertahun infrastruktur jalan

penghubung antara dusun ini tidak pernah terealisasi. Dimasa kepemimpinan Kepala Desa sekarang jalan penghubung tersebut dapat dijalankan, akan tetapi masih belum maksimal untuk masyarakat melakukan aktivitasnya sehari-hari. Akses dalam melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari menggunakan jalur laut, kendaraan transportasi yang digunakan yaitu perahu. Kemudian disaat air laut pasang warga yang berada didusun pulau bajo tidak dapat melakukan aktivitasnya sebagaimana biasanya. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Bapak Saiful selaku Sekretaris Desa mengatakan bahwa setelah dibangunnya jalan penghubung tersebut ada sedikit peningkatan terutama akses pendidikan. Selama ini masyarakat Pulau Bajo ketika berangkat sekolah hanya ketergantungan menggunakan perahu setelah menyebrang mereka harus berjalan kaki hingga berjam-jam menuju sekolahnya. Setelah jalan penghubung direalisasikan sebagian mereka menggunakan kendaraan roda dua di satu sisi, di sisi lain para guru serta staf desa juga dapat menggunakan kendaraan yang sama dan tempat waktu masuk kantor karena kantor tersebut berada di dusun kwangko, begitu juga sebaliknya guru SD serta kepala sekolahnya adalah masyarakat kwangko lebih tepatnya bertempat tinggal di dusun kwangko. kemudian Bapak Salam M. Nor selaku Kepala Desa Kwangko mengatakan pembangunan ini memang berdasarkan kebutuhan masyarakat kwangko khususnya dusun pulau bajo, baik akses untuk pendidikan, kesehatan serta perdagangan untuk meningkatkan perkonomiannya karena masyarakat pulau bajo merupakan berpenghasilan atau pekerjaannya sebagai nelayan. Meskipun belum maksimal diakses oleh masyarakat jalan penghubung tersebut ada peningkatan yang signifikan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

Ketertinggalan pembangunan infrastruktur jalan penghubung merupakan permasalahan yang serius yang mengakibatkan keterbatasan masyarakat dalam berinteraksi dan mendapatkan informasi serta pelayanan sosial yang massif. Sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 No 23 Undang-Undang No. 26 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mengatakan bahwa, kawasan pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. (UU Republik Indonesia No. 26 Tahun 2018 tentang penataan ruang : <http://www.pu.go.id>, diunduh 26 Maret 2019 pukul 22 : 20 WIB) Hasil pengelolaan sumber daya alam (tangkapan laut) merupakan kegiatan utama dilakukan oleh warga Dusun Pulau Bajo, mengalami kesulitan untuk mengeksplor keluar hasil tangkapan mereka, sehingga harus mengalami limit pendapatan perkapita. Sehingga harus mengeluarkan biaya banyak karena harus membawa hasil tangkapan

mereka kesatu desa ke desa lainnya. Begitupun Dusun Kwangko, hasil pertanian tidak melakukan sistem barter atau menjual kepada sesama warga desa, terlebih kebutuhan sandan pangan yaitu ikan harus menunggu dan bergantung pada dusun pulau bajo. Sehingga wajar masyarakat desa kawangko memiliki penghasilan kecil dibandingkan pengeluarannya.

Pembangunan infrastruktur jalan penghubung antar dusun dapat diwujudkan harus sejalan dengan bersamaan adanya partisipasi masyarakat demi mempercepat terciptanya harapan dan tujuan untuk kesejahteraan, mewujudkan desa yang mandiri. Tentunya dalam hal ini pemerintah desa harus berperan aktif, maka dapat dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2015 tentang Desa. Pasal 9 ayat 6 mengatakan bahwa: Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. Dalam artinya kepala desa beserta perangkatnya harus memiliki power yang extra menyatukan semua aspirasi dan rasa gotong royong tersebut untuk pencapaian yang maksimal.

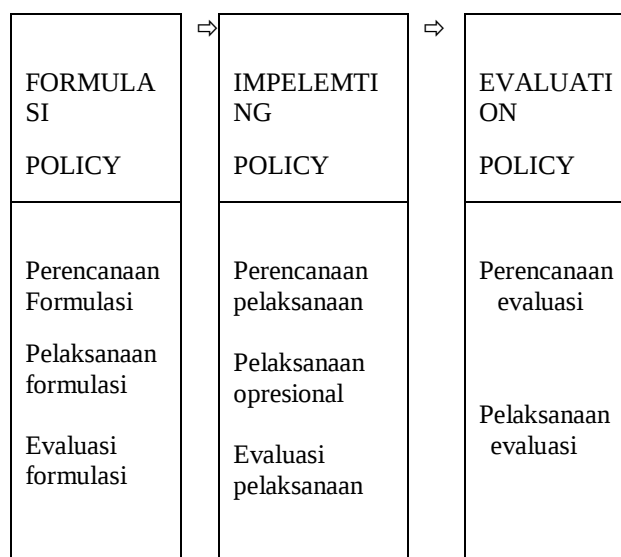
Formulasi kebijakan adalah langkah awal menentukan sebuah proses kebijakan publik secara keseluruhannya, oleh karena itu sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan yang diambil sesuai dengan apa yang diharapkan baik untuk yang akan datang maupun jangka panjang. Setiap kebijakan harus dilakukan atas dasar kebutuhan dan kepentingan kepada masyarakat. Ada beberapa pendapat tentang definisi kebijakan. Eyestone (1971:18) mengemukakan bahwa kebijakan adalah *the relationship of governmental unit to its environment* (hubungan pemerintah dengan unit-unit dalam lingkungan pemerintahan). Hubungan antara pemerintahan adalah sebagai bentuk kebijakan yang bersumber secara *top-down*. Setiap atasan mempunyai kebijakan yang dilakukan oleh bawahan, baik secara kelembagaan atau pun personal. Kebijakan itu berbentuk korelasi antar unsur dan lembaga. Artinya bahwa dalam pencapaian tujuan harus melibatkan beberapa unsur yang terlibat dalam memutuskan dan mengambil keputusan sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada.

Pendapat yang sama disampaikan oleh Friedrich, yang dikutip oleh Seonarko (2000:40), memberikan definisi yang berbeda, bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Fenomena yang terjadi menunjukkan, alat satu faktor pendorong pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut membutuhkan adanya formulasi kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa bersama perangkat desa serta masyarakat. Dengan adanya formulasi kebijakan segala persoalan akan bisa akan bisa terealisasi untuk kemakmuran masyarakat. Untuk merencanakan terhadap apa yang diputuskan dan diambil kebijakannya, dalam kaidah formulasi kebijakan.

Buku Hayat (2018) yang berjudul kebijakan publik menjelaskan bahwa kebijakan publik mempunyai tiga aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaannya yaitu formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Seperti yang tergambar pada gambar dibawah ini :

GAMBAR 1. Proses Kebijakan Publik



Sumber : Hayat (Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, Formulasi 2018)

Berdasarkan pernyataan diatas telah membuktikan, formulasi kebijakan sebagai solusi dapat diterapkan dan memberikan dampak yang positif, sehingga memberikan kesan dan pesan yang memberikan dorongan partisipasi masyarakat dalam membuat suatu kebijakan yang akan ditetapkan bagi kehidupan masyarakat. Secara umum untuk kebaikan dan kepentingan masyarakat sehingga perlu dilakukan formulasi kebijakan. Mengenai beberapa aspek yang dijadikan rujukan dalam pencapaian tujuan yang diharapkan bersama serta target pelaksanaan yang sudah ditetapkan. Karena dalam pembangunan infrastruktur fisik membutuhkan formulasi kebijakan untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan secara keseluruhan.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menurut Bogdan dan Tolyor dalam Moleong peneliti yang menghasilkan penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur peneliti yang menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang atau perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2006:4)

Sedangkan menurut Kirk dan Miller (1986:9) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristiwanya..

Penulis lain juga mengatakan bahwasanya penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kualifikasi lainnya

Jadi dari beberapa definisi diatas disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

Sedangkan penelitian deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau obyek penelitian berdasarkan fakta tanpa yang adanya (Nawawi, 2001:630)

Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian deskripsi untuk menerangkan, dan menggambarkan dan melukiskan suatu realitas sosial yang kompleks untuk memecahkan masalah yang ada dimasyarakat.

2.2. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian, maka perlu adanya batasan-batasan penelitian yang difokuskan melalui indikator-indikator sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur jalan penghubung antar dusun berbasis partisipasi masyarakat (Studi tentang formulasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan penghubung antar dusun Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompus, NTB)
2. Proses Formulasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan penghubung antar dusun yang dilakukan oleh aparatur Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompus, NTB?
 - a. Bentuk Partipasi Masyarakat Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompus, NTB ?
 - b. Usaha aparatur desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

formulasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan penghubung antar dusun Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompus NTB ?
Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompus, NTB ?

3. Faktor yang mempengaruhi formulasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan penghubung antar dusun Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompus NTB?

- a. Faktor pendukung
 1. Kesadaran masyarakat Desa Kwangko
 2. Koordinasi semua stakeholder
 3. Adanya dukungan pemerintah dan masyarakat desa
- b. Faktor penghambat
 1. Waktu
 2. Anggaran
 3. Rendahnya kualitas pendidikan

2.3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dimaksud dengan lokasi penelitian adalah tempat atau lokasi dimana penelitian ini akan dilaksanakan untuk memperoleh data atau informasi terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Lokasi penelitian adalah tempat sebenarnya menjadi objek dalam penelitian ini, sehingga mampu memberikan informasi akurat yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompus NTB dan masyarakat disekitarnya

2.4 Informan Penelitian

Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian ini, maka diperlukan informan. Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sumpling*. Sesuai dengan namanya *purposive sumpling* diambil dengan maksud tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa subjek penelitian yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan ini.

Selain itu pemilihan informan penelitian yang akan dilakukan ini disesuaikan dengan tujuan, dan permasalahan penelitian tentang Pembangunan Infrastruktur jalan penghubung berbasis partisipasi masyarakat (Studi Formulasi Pembangunan Kebijakan Infrastruktur Jalan Penghubung antar Dusun di Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompus, NTB) yaitu :

Tabel 3.4 Informan Penelitian

No	Nama	Profesi	Keterangan
1	Nursalam	Kepala Desa Kwangko 2018	Objek
2	frial M. Nazir	Sekretaris Desa Kwangko	Objek
3	A. Haris SPT	Ketua BPD Desa Kwangko 2018	Objek
4	Nike	Anggota BPD 2017-2018	
5	Baco Aceng	Kepala Dusun Desa Kwangko 2017	Objek
6	Saiful	Kepala Desa Kwangko 2017	Objek
7	Japar	Ketua BPD 2017	Objek
8	Sao	Ketua LPM 2018	
9	Bambang	Masyarakat	Objek
10	A. Latif	Masyarakat	Objek
11	Lahmudin Tongen	Tokoh masyarakat	Objek

2.5 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang di ambil dari penelitian ini adalah kaitanya dengan sumber-sumber penyediaan informasi yang mendukung menjadi pusat perhatian penelitian. Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung terhadap subjek penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- Observasi yaitu cara mengumpulkan yang berdasarkan atas tinjauan dan pengamat peneliti secara langsung terhadap aspek-aspek yang terkait dengan kebijakan formulasi pembangunan infrastruktur berbasis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya.
- Interview atau wawancara yaitu tindakan dalam melakukan tanya jawab yang telah

dipilih dalam hal pengumpulan informasi yang relevan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka (library researt) untuk mengumpulkan data-data melalui buku-buku,peraturan-peraturan, serta dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian.

2.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan adalah prosedur Sumber Data adalah prosedur sistematis data standar untuk memperoleh data yang diperlukan,(Nazir, 1998:221). Oleh karena yang dihipunkan merupakan data yang memuat segala informasi mengenai masalah penelitian yang dipecahkan atau dijawab. Guna memperoleh data dan informasi serta keterangan-keterangan bagi kepentingan penulisan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Metode wawancara adalah suatu proses untuk kepentingan penelitian dengan informan atau subjek yang berhubungan dengan penelitian. Adapun model wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian menggunakan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif ada dua model, yang pertama adalah melalui wawancara struktur dalam cara menentukan masalah-masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan. Yang kedua yaitu kedua yaitu wawancara tidak struktur yaitu peneliti melakukan wawancara tanpa menyusun daftar terlebih dahulu.

2. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan yang dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan gambaran secara langsung dari institusi sosial dilapangan. Hari ini berarti mengamati kondisi pelayanan publik dalam kenyataannya. Dari hasil pengamatan diharapkan akan diperoleh dua pendukung sebagai usaha untuk mendapatkan informasi selengkap-lengkapannya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen, data atau arsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data diperoleh dari instansi, kantor atau tempat yang telah ditetapkan menjadi lokasi penelitian.

2.7 Keabsahan Data

Menurut Moleong (2011:324) untuk menentukan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 4 teknik penelitian yang dapat dipergunakan dalam menempatkan keabsahan data yaitu :

1. Kepercayaan (*credibility*)
Untuk memperhatikan derajat kepercayaan temuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.
2. Keteralihan (*transferability*)
Merupakan proses empiris yang tergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima untuk melakukan pengalihan tersebut, penelitian akan mencari data dan mengumpulkan dalam konteks yang berhubungan dengan pengolahan data pada lembaga pemerintah tersebut.
3. Ketergantungan (*dependability*)
Ketergantungan dilihat dari istilah konvensional dapat disebut sebagai reabilitas. Reabilitas merupakan syarat bagi validitas, hanya dengan alat yang reliabel, maka akan diperoleh data yang valid.
4. Kepastian (*confirmability*)
Dalam menentukan kepastian peneliti jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, peneliti yang menjadi sumber utama. Selain itu juga peneliti melakukan diskusi secara kontinew dengan dosen pembimbing.

2.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis adalah suatu cara penelitian digunakan untuk menguji dan menarik kesimpulan analisis data adalah suatu penelitian ilmiah yang paling penting karena dengan analisis suatu data dapat diberi arti atau makna berguna dalam memecahkan masalah-masalah penelitian.

Menurut Patton dalam Moleong (2011:280), teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan arti signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data yang tidak menggunakan perhitungan-perhitungan yang bersifat statistik.

Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data sebagai berikut:

1. Pengumpulan data.
Pengumpulan data adalah mencari, mencatat serta mengumpulkan data dengan subjektif dan apa yang ada sesuai dengan hasil wawancara dengan dokumen lapangan yang berkaitan dengan formulasi pembangunan infrastruktur jalan penghubung antar dusun di Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.NTB.
2. Reduksi data
Reduksi data merupakan kegiatan merangkum catatan-catatan lapangan dalam dengan memilah hal-hal yang pokok yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Untuk menyederhanakan, pengabsorbaran dan transformasi data yang

ditemukan saat beradab dilapangan penelitian. Berkaitan dengan formulasi pembangunan infrastruktur jalan penghubung antar dusun di Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.NTB.

3. Penyajian data
Pengajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan baik pengajian data dalam bentuk tabel maupun naratif yang menggabungkan informasi yang tersusun kedalam bentuk terpadu.
4. Verifikasi dan kesimpulan merupakan proses mencatat sketeraturan, penjelasan konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dari proporsi peneliti menurut data yang diperoleh dilapangan. Dalam analisis data ada 4 tahap yaitu : pengumpulan data, reduksi data, pengajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai formulasi kebijakan infrastruktur jalan penghubung antara dusun di Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu- NTB dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, maka dapat disimpulkan bahwa :

4.1.1 Proses formulasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan penghubung antara dusun di desa kwangko

1. Upaya Aparatur Desa dalam proses formulasi kebijakan infrastruktur jalan penghubung antara dusun di desa kwangko. Sudah dilakukan sesuai prosedur desa dengan menggunakan model proses, model rasional, dan model kesimpulan.
2. Bentuk partisipasi masyarakat dalam proses formulasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan penghubung antara dusun tergolong bermacam-macam, ada yang pro dan kontra, yang pro berperan aktif baik secara pikiran, tenaga, pemberian izin lahan serta membantu menentukan kebijakan apa yang harus diputuskan dan diambil kebijakannya. Sedangkan yang kontra lebih ingin menggagalkan program tersebut.
3. Dalam proses formulasi kebijakan melahirkan sebuah keputusan yang akan dijadikan sebagai kebijakan aparatur desa meningkatkan partisipasinya diantaranya 1. Memberikan pemahaman kepada semua stakeholder yang hadir prospek kedepannya. 2. Memberikan motivasi akan kegunaan program yang diusulkan memberikan dampak yang signifikan untuk melangkah

menuju perubahan. 3. Memberikan intruksi langsung ataupun tidak langsung bahwa program ini kita kawal Bersama dengan tanggung jawab Bersama kepada semua stakeholder lebih khususnya aparatur desa. 4. Melakukan koordinasi semua stakeholder agar kebijakan mengenai program ini warga harus berpartisipasi.

Artinya dalam penyampaian diatas bahwa formulasi kebijakan adalah hal yang paling mudah untuk dipahami dan cocok untuk dijadikan pedoman untuk tingkat desa karna dengan pemahaman yang rendah karna teori formulasi tidak memiliki kesulitan bahkan secara tidak langsung adalah cara yang efektif diterapkan dan secara sadar dilakukan oleh aparatur desa sebgaiannya. Karna kebanyakan tingkat desa langsung mengambil kesimpulan dan bersikap otoriter karna memiliki hak sepenuhnya penguasa

4.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi formulasi kebijakan jalan penghubung antar dusun Desa Kwangko.

1. Faktor yang menjadi pendukung
 - a. Faktor kesadaran
Masyarakat Desa Kwangko masih memiliki rasa solidaritas yang tinggi untuk ikut berpartisipasi untuk saling membantu dengan atas dasar itulah akan mewujudkan desa yang mandiri yang mampu bersaing di dunia global. Untuk kemajuan desa nya sendiri.
 - b. Koordinasi semua stakeholder
Dengan adanya koordinasi yang baik sehingga masyarakat lebih semangat berpartisipasi dalam setiap program yang diusulkan serta memberikan ruang yang cukup luas untuk masyarakat berpendapat karena mereka lebih mengetahui kebutuhan setiap wilayahnya masing-masing.
2. Faktor yang menjadi penghambat
 - a. Anggaran
Dalam pembangunan tentunya anggaran yang menjadi penentu akhir program itu akan berjalan atau tidak dan pemerintah tidak menyadri hal ini hak yang sudah dijanjikan tidak dipenuhi sehingga pembangunan yang dilakukan tidak bersifat sia-sia dan tidak butuh pergantian kepemimpinan agar bisa diperbaiki karna pembangunan fisik adalah alternatif yang besar dampaknya bukan hanya ekonomi akan tetapi secara menyeluruh.
 - b. Rendah kualitas Pendidikan
Warga desa Kwangko yang mana pada umumnya hanya lulusan SMP, dan SD, sehingga dalam menentukan sebuah

kebijakan terutama dalam perencanaan mengalami gradasi pemikiran secara rasional sehingga produk yang namanya kebijakan yang menjadikan kekuatan atas jawaban dari berbagai masalah dan sudah disaring akhirnya miskin pemanfaatannya. Karna tingkat Pendidikan sangat berpengaruh untuk sebuah perubahan apalagi dalam membuat sebuah kebijakan.

4.2 Saran

Saran yang dapat penulis berkaitan dengan formulasi kebijakan infrastruktur jalan penghubung antara dusun di Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompus- NTB, yaitu :

4.2.1 Saran Praktis

1. Bagi legislatif, pemerintah harus membuat undang-undang yang mampu menutupi permasalahan dan kelemahan pada undang-undang sebelumnya, dan dapat memberikan jaminan kepada atau membuat pembangunan desa dalam hal pembangunan fisik lebih baik dengan aturan-aturan yang ketat sehingga terciptanya yang namanya kesejahteraan masyarakat.
2. Bagi pemerintah daerah betul-betul menjalankan kewajibannya dengan tidak terlalu mempertimbangkan setiap program yang diusulkan dan mempertimbangkan jumlah anggaran dan 1% yang dijanjikan untuk dialokasikan desa harus dialokasikan karena itu akan membantu setiap program yang akan direalisasikan..
3. Bagi BPD, sebagai Badan Pengawas Desa tentunya juga mampu menghasilkan sebuah perdes yang menjadi acuan dan mendukung untuk menyelesaikan segala persoalan-persoalan Desa dengan pengawasan yang ketat dan efektif secara keseluruhannya agar cita-cita rakyat itu terwujud membentuk sebuah desa yang mandiri.
4. Bagi Pemerintah Desa, pemerintah desa harus lebih memperhatikan masyarakat dengan terus melakukan pendekatan, menjalin komunikasi yang baik secara keseluruhannya agar kecurigaan itu tidak muncul sehingga menjadi pemicu tujuan yang ingin dicapai, memperbaiki sumber daya manusia yang masih rendah, dengan membenahi kualitas Pendidikan, akhlak, intelektualitas dengan penyuluhan serta aktif mengadakan diskusi tentang prospek pembangunan desa yang baik.
4. Bagi Masyarakat, masyarakat desa Kwangko harus lebih aktif dan mengikuti semua program-program yang diusulkan setiap dusun agar desa setapak demi setapak mengalami perubahan dan menjalin komunikasi yang baik dengan aparatur desa agar kesalahan pemahaman tidak terus terjadi dan berlarut antara kedua belah pihak.

5.2.2 Saran Teoritik

1. Saran Teoritik Bagi Penulis, Untuk kedepannya pembangunan bisa lebih tajam lagi dalam memahami fenomenal terutama mempelajari lebih dalam tentang formulasi kebijakan karna berbagai bentuk mana pun kepentingan baik itu dipolitik, persorangan, pribadi tidak akan berpengaruh malah tidak akan menghasilkan sebuah kebijakan yang miskin karena akan menjawab apa tujuan dan prioritas yang hendak dituju, apa kelebihan dan kekurangan dari alternatif kebijakan yang ada, karnas perumusan kebijakan tidak selamanya menghasilkan adminisrasi yang usulkan. Tapi formulasi kebijakan akan menentukan suatu kehidupan suatu masyarakat karna formulasi kebijakan bukan main-main dalam kegiatan. Pemerintah harus memiliki power dalam menerobos sebuah perubahan bukan menyepelkan karna masih ada pergantian kepemimpinan atau saya akan calon kembali. Pembentukan karakter dan jiwa spirit melakukan pembaharuan sebuah desa harus trus dilakukan dengan cara study banding ke daerah-daerah lain. mengukur sejauh mana tingkat pemahaman aparat desa agar desa tersebut mampu berdiri sendiri atau desa yang mandiri. Dan cara memilih staf desa atau pegai desa tanpa harus meilihat latar belakang Pendidikan trlebih dahulu bukan pada kelompok atau sistem dinasti. Tapi memang betul-betul memiliki tingkat pemahaman yang luas dan memiliki cara berfikir berdaya saing global. Beitu juga dengan masyarakat dan para tokoh jagan hanya sekedar memiliki karna dilihat kejujuran misalnya tapi jika tidak menilai dari segi pengetahuan maka amanat yang dititipkan tidak akan mampu menjalankannya karena tidak paham menjalan roda pemerintahan desa. Apa yang akan terjadi banyak maslah yang tidak bisa teratasi dan selalu mencul masalah-masalah baru sehingga dalam kurangan waktu dihabiskan untuk penyelesaian masalah itu tanpa mengasilkan out-put yang jelas sesuai harapan masyarakatnya. Kemudian dari pihal BPD meskipun mereka tidak termasuk dalam strural desa akan tetapi mereka juga dipilih oleh rakyat, akan efektifnya sebuah desa apabila BPDnya juga menjalankan dengan baik tupoksinya, hampir bertahun-tahun BPD tidak mampu mengeluarkan kebijakan yang bermutu, pengawasan yang tidak massif seta memahami tugas dan fungsi BPD kurang mendalami. Padahal penyambung harapan masyarakat ada pada BPD tapi apa yang dihasilkan justru masyarakat yang mengambil alih fungsingnya. Perpolitikan tingkat desa sangat keras terkadang kebijakan itu tumpul dihadap olehnya, didasari kepentingan pribadi sehingga untuk kedaulatan rakyat terkandas dalam sebuah berdebatan teori, siapa yang pintr beralil maka dia yang menang dan berkuasa , bagus jika itu untuk kepentingan orang banyak tapi jika sebaliknya tentu akan melahirkan kebijakan yang miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Wazir. 1999. Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat. Jakarta : AUSAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and care project.
- Adisasmita, Raharjo, 2006. Pembangunan Pelaksanaan dan Perkotaan. Braha Ilmu. Yogyakarta
- Afiffudin.2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan*.Bandung Alfabeta
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
- Chandra, E. 2003. *Membangun Forum Warga : Implementasi Partisipasi & Penguatan Masyarakat Sipil*, Akatiga, Bandung.
- Cohen and Uphoff. 1997. *Rural Development Participation*. Cornel University. New York.
- Dunn, William N. 1984. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi ke 2*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Friedrich, Carl J., 1963. *Man and His Government*. New York: McGraw-Hill.
- H.A.R. Tilaar. 2009. *Kekuasaan Dengan Pendidikan : Kajian Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pasaran Kekuasaan*. Jakarta : Rinika Cipta
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik (Evaluasi, Reformasi, dan Evaluasi)*. Instrans Publishing.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013 Medan:Bitra Indonesia
- Kirk, J. & Miller, M.L., 1986. *Reliability and Validity in Qualitative Research*, Bevely Hills, CA, Sge Publications.
- Kodoatie, Robert J. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Maran, R. G. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta. Rineka Cipta
- Masalah dan Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods sourcebook*, Edition 3. USA: sage publication. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, J. Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Penelitian. Jakarta. Rineka Cipta

- Nawawi, Hadari. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif*. Gajah Mada University-Press, Yogyakarta.
- Nazir. Moch. 1998. *Metode Penelitian*. Ghalia. Jakarta.
- Ndraha. 1999. *Pengantar Teori Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Raneke Cipta
- Ndraha, T. 1990. *Pembangunan Masyarakat : Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta : Rineka Cipta
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Riant Nugroho. 2015. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet.2
- Ruslan, Rosady. 2008. *Manajemen Publik Relations & Media Komunikasi*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada
- Permendagri No. 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa*.
- Sitompul, Rislina F. 2009. *Merancang Model Pengembangan Masyarakat Pedesaan Dengan Pendekatan System Dynamics*. Aceh : LIPI Press
- Tikson, Deddy, 2005. *Keterbelakangan dan Ketergantungan, Teori Pembangunan di Indonesia, Malaysia dan Thailand*. Ininnawa, Makasaar.
- Theresia, Aprilia dkk.. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung : Alfabeta.
- Wibawah, 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta. Kencana
- Winarto Budi, 2002. *Kebijakan Publik Teori & Proses*, Jakarta: Buku Kita.

Skripsi

- Pembangunan Di Desa Rasabou Kematan Sape Kabupaten Bima,NTB*. Jurnal Administrasi Neagara
- Ahmad Cuzinka Santri. 2013. *Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu (Study di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu)*.
- Andi Ripai. 2013.*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kematan*
- Bontomantene Kabupaten Kepulauan Selayar*. Skripsi Ilmu Pemerintah
- Daerah

- Pembangunan Daerah Kota Batu (Studi Di Badan Pembangunan Daerah Kota Batu)*
- Indra Maulana. 2013. *Parisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan*
- Pembangunan Infrastruktur dan realiasi Usulanya Di Kota Surakarta*.
- Tugas Akhir Perencanaan dan Kota
- Khairil Anwar.2008. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Study Tentang Tingkat Pendapat Masyarakat terhadap parisipasi Dalam Pembangunan Di Desa Rasabou Kematan Sape Kabupaten Bima,NTB*.

Jurnal :

- Septyasa, Laksana Nuring. 2013. *Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Program Desa Siaga Bandung Kecamatan Playan Anak*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Vol.8 No.1 2087-0825. Tanggal 13 Maret 2018

Sumber Internet :

- Kebijakan-Kebijaksanaan.
Dari :
<http://akhyar13.blokspot.co.id/2014/10/kebijakan-kebijaksanaan.html>. Di unduh pada tanggal 26 januari 2019 pukul 22:30 WIB
- Pengertian dan Penjelasan Pembangunan. Dari :
<http://xerma.blogspot.com/2014/01/pengertian-dan-penjelasan-pembangunan.html>Di unduh pada tanggal 26 januari 2019 pukul 22:35 WIB

Dokumen :

- Permendagri No. 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 dan Peraturan Pemerintahan RI Tahun 2015 Tentang Desa.